3

PENGEMBANGAN KESENIAN TARI TRADISIONAL SUMATRA BARAT DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

I NYOMAN LODRA

Abstrak

For many centuries, the domain of traditional arts in West Sumatra has been untouched by the academics having creative power to access, analyze, criticize and even to create something on value novelty. The realm of traditional art is intended as in the field of art dance. The art of traditional dance begins to get the shift on their forms, functions, and meanings after the entry of Islamic civilization. Their developments continue concurrently based on the new civilization and progress in the area of academics who give contribution to refresh the Art development. In academics' creations area marked with experiences that exist in the world of tradition, with various approaches (knowledge, technology) is able to bring the art of dance with the value to the "renewal". It is known by the practitioners of the art as "traditional cultural expressions" (EBT). It is the evident in West Sumatra that one of the types of art is "Plate Dance". The Plate Dance in West Sumatra on Hindu civilization was the dance offerings (sacred) welcomed the fall of the Gods. Gria Wayan called it as a cultural value that is inheritance (1996). Plate dance on Hindu Civilization was performed by men and women. Then by academics, it is adapted on the environment of dance "party" custom, marriage, and governmental performance. Hoovel, stated that thing occurs as the shape of society changing slowly or rapidly, (in Sojogyo, 1990: 60) including traditional art in Sumatra Barat. That creation which is able to characterize the value of newness in the development of the traditional dances is the wealth of socio-economic sphere, appropriate protection of intellectual property rights (IPR), in the field of Copyright.

Key words: tradition, changing, newness, creation, copyright.

1. PENDAHULUAN

Indonesia yang memiliki kemajemukan suku, etnis, agama, ras, turut memberikan kontribusi pada kemajemukan kebudayaan, termasuk dalam kesenian tari memiliki keunik, menarik, dan indah. Sumatra Barat, termasuk jajaran daerah-daerah Nusantara dikenal memiliki jenis kesenian tradisional yang berkembang sampai pada peradaban ini. Salah satunya adalah kesenian "Tari Piring".

Jenis Tari Piring termasuk tari tradisional berasal dari Solok Minangkabau mampu

mendulang kepopuleran di Masyarakat Sumatra Barat, bahkan Indonesia. Menurut catatan sejarah, Tari Piring tidak terlepas dari peradaban Hindu yang diperuntukan sebagai tari persembahan untuk para dewa- dewi (sakral). Menurut pemikiran Gria Wayan, hal tersebut sebagai nilai-nilai budaya tradisional yang sifatnya turun-tumurun dan pakem-pakem yang tetap dihormati, (1996).

Ritual persembahan dalam bentuk tari yang membawa piring berisikan makanan ditangan di bawakan oleh para wanita cantik

dan laki-laki yang didandani pakaian bagus. Gerakan tariannya meliuk-liuk dengan sangat indah dan dinamis, oleh masyarakat setempat awalnya tari tersebut dianggap sakral. Prilaku praktisi masyarakat tersebut oleh GRAMSCI, disebut sebagai ideologi yang sejalan dengan agama, secara sukuler dipahami sebagai kesatuan keyakinan antara konsep dan tindakan (dalam CHRIS BARKER, 2008, h.63).

II. Kesenian Tari Tradisional Dalam Perkembangan

Sumatra Barat pada peradaban Hindu, berkembang kesenian tradisional yang cukup membumi diantaranya Tari Piring. Berabad-abad kemudian masuk peradaban Islam ke Minangkabau, kesenian tradisional seperti jenis Tari Piring yang bersifat sakral tersebut mulai terjamah dengan menampilkan kemasan sekuler dipertunjukkan di ruang-ruang sosial lainnya.

Tari Piring bukan lagi untuk sebuah persembahan para dewa-dewi, namun diperuntukan sebagai tarian yang menghibur masyarakat, seperti saat musim panen, pesta perkawinan, dan acara resmi pemerintahan. Pada pentas tarian ini menunjukkan suasana riang gembiranya wanita-wanita cantik dengan dandanan busana bagus, gemerincingnya suara asisoris, menari dengan gerakan meliuk-liuk membawa piring yang berisikan makanan. Makna tersirat dari gerakan atraktif tersebut menggambarkan rasa kegembiraan tatkala musim panen tiba, dan kemeriahan suasana acara pernikahan.

Selanjutnya dalam perkembangan jenis kesenian ini masih diamalkan oleh penduduk Negeri Sembilan keturunan Minangkabau dengan diiringi musik talepong, rebab dan saluang. Tarian dengan gerakan yang atraktif, dinamis, lincah meliuk-liuk sebagai menirukan petani yang sedang bercocok

tanam, memanen, menuai padi dan jenis gerakan tersebut dikelompokkan kedalam tiga variasi gerakan seperti gerakan tupai "bagaluik" (melompat), "bagalombang" (bergelombang) dan "malikik" (melilit). Ruang perubahan mulai terbuka lebar, praktisi dan kalangan akademisi (Perguruan Tinggi) termasuk di ISI Padang, para mahasiswa pada tugas akhir (TA), dan dosen yang haus berkreasi kreatif menjadikan kesenian tradisional Tari Piring tersebut menjadi objek berkreasi kreatif. Kajian-kajian mendalam oleh praktisi, mahasiswa, dosen terhadap Tari Piring menampilkan keragaman kesenian dalam bentuk lain. Penggeseran, perubahan pada nilai-nilai tradisional, memberikan imbas pada perubahan system nilai kemasyarakatan, yang mungkin mengarah pada komplik (RAHO BERNARD: 2007). Tampak keindahan gerak, kemeriahan busana seperti pada gambar dibawah ini Tari Piring.

Tari Piring Tunggal, dan Tari Bersama
(Sumber, pengambilan gambar dari internet, 2014).

Dua gambar 'Tari Piring di atas tampak telah mengalami perkembangan, setelah masuknya peradaban Islam ke Sumatra Barat. Bentuk, fungsi, dan makna kesenian tradisional jenis Tari Piring, pada perkembangan busana, asesoris, dan tabuh pengiringnya tampak ada pergeseran menuju sebuah kemegahan, kemewahan, dengan pemakaian yang tidak terlepas dari ruang estetika yang lebih luas.

Tari tradisional awalnya sebagai media ritual persembahan (LODRA, 2013), untuk para dewi-dewi, karena telah diberikan limpahan kesuburan yang membuat para petani menjadi senang di saat panen tiba. Namun pada perkembangan terakhir jenis tari tradisional telah termodifikasi dengan dasar kreativitas menjadi sebuah pertunjukan dan mulai ditanggap untuk mengisi acara perkawinan, dan upacara adat, dan pemerintahan.

Komodifikasi pada kesenian tersebut, disebut sebagai ekspresi budaya tradisional (TBT) ada nilai-nilai kebaruan. Nilai kebaruan yang dimaksudkan dalam kesenian Tari Piring, dalam Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 disebut sebagai kekayaan intelektual (KI), yang perlu mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dalam bidang Hak Cipta (MASSUDILAWA & Partners, 2008).

III. TARI PIRING DALAM PERSPEKTIF HKI

a. Perkembangan Tari Piring

Kesenian tradisional Tari Piring diketahui sudah ada sejak 800 tahun pada zaman kerajaan Sriwijaya. Pada zaman ini kesenian tradisional ini masih mengacu konsep persembahan. Tari Piring diawali dengan permainan musik rebana, gong dengan rangkaian tari yang dimainkan oleh penari laki-perempuan.

Selanjutnya kesenian tradisional Tari Piring, mengalami evolusi perkembangan sebagai dampak dari kemajuan pengetahuan, teknologi, serta lingkungan. Selain pertimbangan akademis juga adanya gerakan global menjadikan pergeseran "Tari Piring".

Globalisasi bisa sebagai pengkayaan pada kesenian itu sendiri, atau sebaliknya juga memusnahkan atau penghacuran nilai identitas etnik (ALO LELIWERI: 2005). Menurut Robertson, globalisasi memberikan imbas pada perubahan yang membuat masyarakat bersikap individualistik, materialistik, apriori terhadap lingkungan, memecah lapisan komunal religius menjadi sekularisasi, dan tidak tertutup kemungkinan mengarah pada konflik internal dan konflik eksternal (BARKER, 2007:117).

Hal yang sama dipahami Piliang, globalisasi merupakan proses terintegrasi berbagai elemen kehidupan kedalam sebuah sistem tunggal berskala Dunia. Sedangkan Appadurai, globalisasi terkait dengan pergerakan manusia (ethnoscape), pergerakan media (mediascape), pergerakan teknologi (technoscape), pergerakan uang (finanscape), dan pergerakan ideologi (ideoscape) (dalam RITZER dan DOUGLAS, 2007: 598). Sama juga yang dikatakan Anthony Giddens dan Colin Hines melihat bentuk globalisasi yang sekarang sebagai intensifikasi, jejaringan relasi-relasi sosial di seluruh Dunia yang integrasi perekonomian lokal, nasional ke ekonomi global yang dibantu dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi (BURNETT, dalam SMIER, 2009: 2, HINES dalam SMIER, 2009: 21). Masuknya Agama Islam ke Sumatra Barat, membawa imbas global, seperti yang dijelaskan Appadurai, terbungkus dalam pergerakan manusia (ethnoscape), dan pergerakan ideologi (ideoscape) membawa perkembangan kesenian tradisional "Tari Piring" yang sehingga menjadi

terkenal keseluruh penjuru Dunia. Kesenian ini pada masa peradaban Hindu hanya dikhususkan sebagai media persembahan, bersifat sakral. Seperti yang kita lihat perkembangan kesenian tradisional ini keranah sekuler yang bersifat komersial.

Dalam persepektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), "Tari Piring" yang menjadikan objek kreasi kreatif oleh para pegeiat seni pertunjukan termasuk bagian dari ekspresi budaya tradisional (EBT), dengan nilai kebaharuan memiliki hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumberkan hasil kerja otak, dengan mengedepankan rasio bernalar wajib mendapatkan perlindungan HKI, bidang Hak Cipta (SAIDIN (2007: 9). Sejalan dengan pemahaman RISWANDI HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul sebagai akibat terjadinya proses kemampuan intelektual manusia.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah karya-karya berupa pengetahuan seni, sastra, dan teknologi yang membutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya (2005: 31). Konseptualnya HKI adalah hak atas kepemilikan kebendaan tidak berwujud dari daya cipta, rasa karsa, terhadap karyakarya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan intelektual atau kemampuan dapat dibentuk melalui pendidikan dan latihan, yang bisa menghasilkan atau memperoleh sesuatu temuan (invensi), misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seperti dalam seni Tari Piring.

b. Perspektif HKI

Hak Kekayaan Intelektual atau lazim disebut (HKI) memberikan peluang kepada kemampuan seseorang atau beberapa orang, secara bersama - sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan melalui imajinasi pikiran, kecekatan, ketrampilan,

atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Walaupun terkadang untuk menuangkannya seseorang tidak mempunyai keberanian, ragu atau takut orang lain mengetahui tentang keaslian karya ciptaannya.

Bisa juga sebaliknya sebagai suatu upaya memperlancar jalannya proses penuangan imajinasinya, yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Akan tetapi tidak demikian ketika kekayaan intelektual telah menjadi bagian proses kreativitas seseorang atau kelompok. Jika tidak disikapi dengan pendaftaran hasil kreasi kreatifnya bisa saja didahului oleh pihak lain yang bukan penciptanya dan menjadi milik selamanya.

SAIDIN (2007: 5) mengetengahkan hukum hak atas benda immaterial, dalam kepustakaan hukum disebut sebagai hak milik intelektual atau HKI (intellectual property rights), dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) copyrights (hak cipta) (2) hak atas kekayaan industri, termasuk (intellectual rights) yang terdiri atas: paten, merk, desain produk industri, varietas baru tanaman, rangkaian dan elektronika terpadu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa HKI cakupannya sangatlah luas, termasuk bidang musik, tari, drama, film, grafis, seni lukis, patung, keramik, serta temuan-temuan di bidang matematika, mesin dsbnya.

HKI terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring perubahan aspek penghargaan atau pengakuan secara nasional maupun internasional. Jenis-jenis HKI yang telah diratifikasi dan diundangkan beserta sanksi jika ada pelanggaran. Jenis HKI beserta sanksi-sanksinya:

a. Hak Paten

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, terdapat

sanksi tindak pidana sebagai berikut :

1. Sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten (Pasal 130 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf a).
2. Sengaja dan tanpa hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang (Pasal 130 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf b).
3. Sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan produk yang diberi paten Sederhana (Pasal 131 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf a, b).
4. Sengaja tidak menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen permohonan (Pasal 132 jo Pasal 25 Ayat (3).

b. Hak Merek

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terdapat sanksi tindak Pidana sebagai berikut:

1. Mempergunakan merek yang sama keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis (Pasal 90, (Pasal 91).
2. Mempergunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain (Pasal 92 Ayat (1).
3. Mencantumkan asal sebenarnya pad barang hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukan barang merupakan tiruan dari barang terdaftar (Pasal 92 Ayat (3).
4. Memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran Pasal 90, 91,92 atau 93.

c. Hak Cipta

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut (Massudilawe & Partners, 2008):

1. Tanpa persetujuan pelaku membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelaku (Pasal 72 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), jo Pasal 49 Ayat (1), Ayat (2).
2. Sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak yang terkait (Pasal 72 Ayat (2).
3. Sengaja mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta keretriban umum (pasal 72 Ayat (4) jo Pasal 17).
4. Sengaja mengumumkan potret orang yang dibuat tanpa persetujuan orang yang dipotret apabila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 20), Pasal 49 Ayat (3).
5. Dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan nama pencipta, mengganti atau mengubah judul atau isi ciptaan (Pasal 72 Ayat (6) jo Pasal 55).
6. Dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau dibuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta (pasal 72 Ayat (8) jo Pasal 27).
7. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan (Pasal 72 Ayat (9) jo Pasal 28).

d. Rahasia Dagang

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :

1. Sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain (Pasal 17 Ayat (1).
2. Sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban menjaga rahasia dagang (pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 13).
3. Sengaja memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 14).

c. Desain Industri

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :

- 1). Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri (Pasal 54 Ayat (1) jo Pasal 9).
- 2). Sengaja tidak mencantumkan nama pendesain hak desain industri dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri (pasal 54 Ayat (2) jo Pasal 8).

f. Varietas Tanaman

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :

1. Sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, dan lain- lain varietas tanaman tanpa

persetujuan pemegang hak PVT' (Pasal 71 jo Pasal 6 Ayat (3).

2. Konsultan PVT yang dengan sengaja tidak merahasiakan varietas tanaman dan dokumen permohonan hak PVT (Pasal 72 jo Pasal 1 Ayat (1).
3. Pemeriksa PVT atau Pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya (pasal 74 jo Pasal 30 Ayat (3).
4. Dalam hal pengalihan hak desain industri dengan sengaja tidak lagi mencantumkan nama dan identitas pendesain desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri (Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 32).
5. Desain 'Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST),
6. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain 'Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), terdapat tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak DTLST (Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1).
 - b. Sengaja tidak mencantumkan nama pendesain dalam sertifikatDTLST, daftar umum DTLST, dan berita resmi DTLST (Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 7).
 - c. Dalam hal pengalihan hak DTLST dengan sengaja tidak lagi mencantumkan nama dan identitas pendesainDTLST dalam sertifikat DTLST, berita resmi DTLST, maupun dalam daftar umum DTLST' (pasal

42 Ayat (2) jo Pasal 24).

BAB III. TARI PIRING DAN HAK CIPTA

Tulisan ini secara khusus membahas persoalan Tari Piring dengan Hak Cipta, dengan alasan banyaknya hasil kreasi yang bersumberkan dari nilai-nilai tradisi oleh akademisi, seniman di lingkungan Sumatra Barat tidak diproteksi hukum. Mungkin malahan sebaliknya orang, atau kelompok lain yang mendahului meng-Hak-Cipta-an. Contoh, masih ingat “kasus” Reog Ponorogo, Legong Bali, Motif-motif Budaya Bali? Semuanya pernah menjadi dimiliki orang asing.

Hak cipta dipahami sebagai hak yang diberikan pada setiap hasil ciptaan yang menunjukkan keaslian atau kebaharuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dalam undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2002, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta juga ditegaskan ada pencipta dan hasil ciptaan.

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Ketentuan pasal 1 ayat (1) UU hak cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah sesuatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hak Cipta dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hak moral (*moral rights*), hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta dan hak ekonomi (*economic rights*), hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi (Massudilawe dan Partners, 2008: 2). Sementara itu yang dimaksud dengan hasil ciptaan yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta, mengartikan sebagai berikut: “ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta adalah hak alami yang bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si Pencipta hidup dan beberapa tahun setelah meninggal dunia.

Dapat dipertahankan terhadap siapa pun, serta menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Karena sifatnya yang abstrak (*incorporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan imajinasi, gagasan dan pikiran, yang apabila telah habis masa perlindungannya akan menjadi milik umum (*Domain Public*).

Secara faktual muncul persoalan sejalan dengan implementasi kesepakatan AFTA, 2015 nanti (*ASEAN Free Trade Area*) membuka peluang pasar dan ancaman cukup lebar, jika kita tidak menyikapi proaktif pada Hak Cipta.

Oleh karena setiap produksi termasuk kreasi kreatif “Tari Piring” tersebut wajib untuk dipikirkan Hak Ciptanya.

DAMPAK HAK CIPTA

Konsekuensi sebagai dampak penerapan praktek HKI bidang Hak Cipta bagi masyarakat akademisi, seniman, bisa menjamin kenyamanan (positif) dan bisa juga memunculkan kegelisahan dan malapetaka (negatif).

a. Positif

Dalam era global ini Indonesia, termasuk Sumatra Barat, patut mengikuti sistem yang di sepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota World Trade Organisation (WTO), yang dimotori oleh negara-negara maju. Pada setiap produk termasuk kreasi kreatif yang bersumber dari Tari Piring patut dilengkapi dengan sertifikat Hak Cipta, untuk mendapatkan perlindungan hukum internasional. Dampak lain dari perlindungan hak cipta adalah para penggiat seni tari lebih nyaman dan tidak ada kekawatiran terjadinya plagiat.

b. Negatif

Kesalahan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, seperti HKI, dalam proses pengHak-Ciptaan akan berdampak langsung pada kehidupan dan masa depan penggiat seni karena masa ikatan Hak Cipta sampai 50 tahun.

BAB IV, KESIMPULAN

Pada seminar Nasional dengan naskah yang sangat singkat ini dengan dengan tema PENGEMBANGAN KESENIAN TARI TRADISIONAL SUMATRA BARAT DALAM PERSEPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), maksud dan tujuan dari penulis mengajak (barangkali belum) para praktisi, mahasiswa, akademisi seni tradisional khususnya seni Tari Piring, untuk meng-

Hak-Ciptakan. Menyongsong AFTA, tahun 2015 betapa penting, bahkan” wajib” untuk melindungi setiap hasil karyanya yang memiliki nilai-nilai “kebaharuan”, jika tidak mau diklaim oleh orang lain. Penulis pikir arena ini sangat cocok dibahas oleh karena para penggiat seni tersebut yang bergulat sebagai garda depan pengamat, pengembang, pelestarian budaya Sumatra Barat, dan mampu menyelamatkan jati diri ditengah libasan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

AGGER BEN.

2007. *Teori Sosial Kritis, Kresi Wacana*. Yogyakarta.

ARDIKA WAYAN dkk.

1989. *Dinamisme Kebudayaan Bali*. PT Upada Sastra, Denpasar.

BARKER CHRIS.

2008. *Cultur Studies*. Kresi Wacana Yogyakarta.

KAPLAN DAVID, dkk.

999. *Teori Budaya*. Pustaka Pelajar.

Liliweri Alo.

2005. *Prasangka dan Konflik*, IkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.

MANTRA IB.

1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Yayasan Dharma sastra Denpasar.

PUJIANIKI, NI NYOMAN.

2008. *Perlindungan HKI Bali Ke depan*. Sentra HakI UNUD.

SARDJONO AGUS.

2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. PT Alumni Bandung.

RISWANDI AGUS BUDI.

2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT Raja Grafindo Jakarta.

Rujukan Media cetak :

BALI POST.

29 April 2008. *Sidang Pelanggaran
Hak Cipta Jangan Korban Desainer
Lokal.*

FAJAR BALI.

29 April 2008. *Kantongi Sertifikat Hak cipta,
Malab Didakwa melanggar.*

JAWA POST.

17 Oktober 2008. *Asing Patenkan Mebel Japara.*

RADAR BALI.

2006. *Pengumuman dan peringatan Hak Cipta dan
Desain I.*